

Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja

Mahardhika Cipta Raharja, Unik Lestari

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: mc.raharja@uinsaizu.ac.id, unikles17@gmail.com

Article Info

Article history:

Published: June 19, 2022

Page: 86-101

Keyword:

Inequality Development, HDI, DDI, FDI

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh PMA, PMDN, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan kabupaten/kota dan bagaimana variabel mediasi IPM juga berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum Omnibus Law Cipta Kerja. Analisis data menggunakan analisis jalur dengan program Eviews, dengan menggunakan data 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2019. Hasilnya, bahwa PMDN dan PMA berpengaruh positif terhadap IPM. PMDN dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan, sedangkan PMA tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, PMA, PMDN, IPM, Omnibus Law Cipta Kerja

This study analyzes the effect of Foreign Investment (PMA), Domestic Investment (PMDN), and the Human Development Index on the inequality of district/city development and how the mediating variable of the Human Development Index (IPM) also affects the inequality of district/city development in Central Java Province, before the Omnibus Law Cipta Kerja. Data analysis uses path analysis with the Eviews program, using data from 35 districts/cities in Central Java Province in the 2016-2019 period. The result is that PMDN and PMA have a positive effect on IPM. PMDN and IPM have a negative effect on development inequality, while PMA has no effect on district/city development inequality in Central Java Province.

Keywords: *Inequality Development, HDI, DDI, FDI*

Copyright © 2022 *OECONOMICUS Journal of Economics*

Pendahuluan

Setiap daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup

masyarakat, salah satu caranya dengan pembangunan ekonomi yang baik. Secara konsep, ukuran dari tingkat kesejahteraan

Editorial Office:

Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia.

Email: oje@uinsby.ac.id

sebagai hasil dari pembangunan ekonomi tersebut yaitu pendapatan perkapita yang merupakan perbandingan antara pendapatan dengan jumlah penduduk. Bagaimana menemukan suatu titik temu diantara upaya dalam meningkatkan pendapatan perkapita dengan pertumbuhan ekonomi dan disisi lain mengupayakan pemerataan pertumbuhan antarwilayah (Nurhayani, dkk., 2015). Tetapi, dengan terdapatnya perbedaan dan tidak meratanya aspek penunjang ekonomi antara lain investasi yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta indeks pembangunan manusia akan menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah. Ketimpangan merupakan salah satu masalah yang serius untuk ditanggulangi dan umum terjadi yang menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial serta menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Ketimpangan juga memiliki dampak positif yaitu mendorong daerah lain yang kurang maju dan berkembang. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam, kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah dan alokasi dana pembangunan antarwilayah (Sjafrizal, 2008).

Penanaman modal baik dari dalam negeri maupun investor asing mempunyai peranan dalam menentukan perekonomian suatu negara. Jika penanaman modal asing hanya sebagai tambahan modal untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi oleh penanaman modal dalam negeri, maka penanaman modal asing hanya akan berpengaruh dalam jangka pendek. Hal

ini karena peran penting penanaman modal asing akan semakin efisien dalam mentransfer aset. Di sisi lain, penanaman modal asing dapat membawa inovasi pada negara tujuan investasi sehingga dapat mendorong perekonomian melalui kegiatan usaha yang lebih efektif dan efisien. Meningkatnya perekonomian melalui pembelajaran teknologi asing dan cara lainnya belum terlalu efektif pada negara berkembang karena memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah (Li & Liu, 2015). Indeks pembangunan manusia disini berperan penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan peningkatan perekonomian tersebut sangat bergantung kepada produktifitas pekerja bukan jenis investor (Wang & Wang, 2015).

Pemerintah daerah di Indonesia sebagai pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya bagi pembangunan daerah, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan pembangunan daerah diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah, dengan orientasi yang berbeda (Li & Wei, 2010). Beberapa daerah berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sebagai strategi pembangunan, sedangkan beberapa bidang lainnya berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keanekaragaman sumber daya, kemampuan, kebutuhan, dan potensi di setiap daerah mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Lesmann, 2012).

Isu lain yang menarik menjadi perhatian adalah dengan ditetapkannya Omnibus Law Cipta Kerja melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

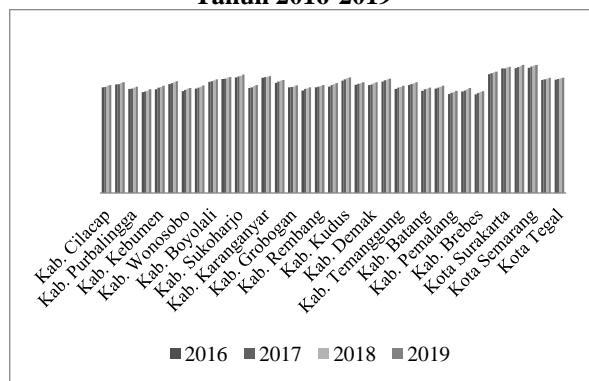
Regulasi tersebut secara signifikan mengubah tatanan aturan di Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Secara konsep, perlu persiapan matang dalam melaksanakan tatanan regulasi baru tersebut, termasuk mengidentifikasi terkait bagaimana kondisi ekonomi sebuah wilayah sebelum regulasi tersebut diterapkan sebagai sebuah gambaran awal kesiapan wilayah tersebut menyambut aturan baru yang ada.

Daerah yang potensial dalam pembangunan ekonomi adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang padat. Kondisi provinsi yang unik ini, masih memiliki perekonomian yang relatif stabil (Soekapdjo, dkk., 2020). IPM dan penanaman modal dalam negeri dan modal asing di Jawa Tengah tahun 2016-2019 mengalami peningkatan. Namun kondisi tersebut belum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pembangunan Jawa Tengah tahun 2016-2019 dengan Indeks Williamson masih tinggi tetapi mengalami penurunan. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, ketimpangan wilayah merupakan isu strategis yang saat ini masih harus ditangani. Kajian ini penting untuk dilakukan mengingat ketimpangan merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Ketimpangan pembangunan ini terjadi karena ketidakmerataan aspek ekonomi antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Provinsi Jawa Tengah dengan indeks pembangunan manusia yang terlihat adanya peningkatan secara berkelanjutan pada setiap kabupaten/kota. Perkembangan nilai indeks pembangunan manusia ini tentunya

tidak merata pada setiap wilayah karena perbedaan kondisi demografis.

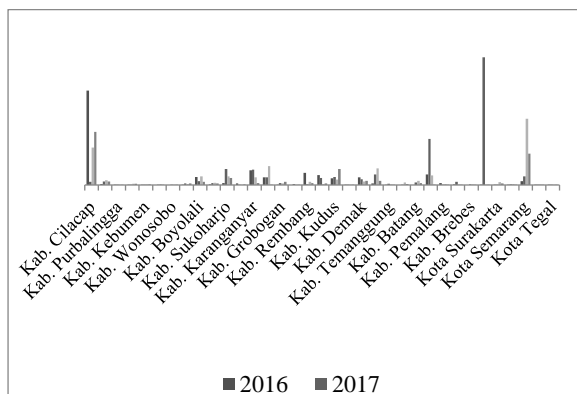
Grafik 1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

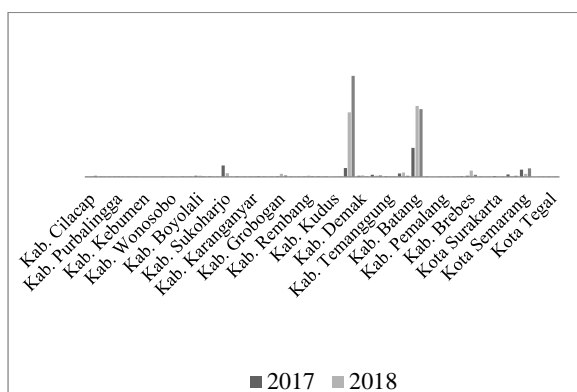
Di sisi lain, dinamika perekonomian daerah Jawa Tengah yang tidak lepas dari peranan investasi yang ditanamkan di setiap kabupaten/kota. Di mana dalam upaya pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah diperlukan investasi yang terus meningkat dan harus dicukupi dengan memperhatikan kemampuan daerah sendiri dan kemampuan nasional. Realisasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing yang belum merata serta cenderung fluktuatif pada tiap kabupaten/kota. Terdapat wilayah yang belum menjadi sasaran investasi ataupun dengan nilai investasi yang rendah. Tetapi secara kumulatif jumlah realisasi investasi yang masuk di Provinsi Jawa Tengah relatif meningkat. Hal tersebut terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2
Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

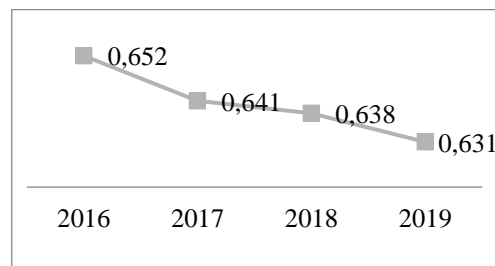
Grafik 3
Penanaman Modal Asing Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah Indeks Williamson. Nilai Indeks Williamson yang tinggi di suatu daerah menunjukkan ketimpangan pembangunan yang tinggi antarwilayah di daerah tersebut (Sjafrizal, 2008). Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah apabila diukur melalui Indeks Williamson dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016-2019



Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian yaitu: (1) untuk menguji pengaruh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap indeks pembangunan manusia; (2) untuk mengkaji apakah indeks pembangunan manusia memediasi pengaruh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah; & (3) untuk menguji pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, & indeks pembangunan manusia pada ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Kajian Pustaka

Konsep ketimpangan pembangunan merupakan gambaran dari kesenjangan pembangunan dari satu wilayah ke wilayah lain. Ketimpangan tersebut merupakan ketidakmerataan distribusi pembangunan ekonomi antar wilayah. Kondisi tersebut merupakan masalah umum yang sering terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu wilayah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang ada pada tiap wilayah. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan kemampuan antarwilayah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan, sehingga terbentuk wilayah maju (*developed region*)

dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*). Ketimpangan pembangunan tersebut akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah (Sjafrizal, 2008). Konsep dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Indeks Williamson, yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016-2019.

Investasi atau penanaman modal merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003). Kebijakan alokasi investasi regional menjadi penting bila tujuan pembangunan wilayah yang dicapai yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, karena dengan hal itu dapat ditentukan prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan (Sjafrizal, 2008). Investasi dapat menjadi titik tolak keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berpotensi mengurangi disparitas atau ketimpangan antarwilayah. Namun, jika investasi terkonsentrasi di satu kabupaten/kota, maka akan mendorong terjadinya ketimpangan antarwilayah (Dwirandra, 2021).

Penanaman modal atau investasi ini berkaitan dengan Teori Tabungan dan Investasi oleh Harrod Domar (1947) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi

ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga akan rendah. Masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal, masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Jika terdapat modal dan modal itu diinvestasikan maka idealnya hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Investasi yang masuk baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Menurut Sukirno (1982), adanya penambahan investasi akan dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang nantinya akan menyerap angkatan kerja. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita. Investasi memiliki peranan vital dalam pola pembangunan wilayah untuk mengembangkan sektor-sektor yang berada di wilayah tertentu, namun realisasi antara PMA dan PMDN ini seringkali hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu saja. Hal tersebut berkaitan dengan investor yang menilai daerah dengan potensi menjanjikan yang dijadikan sebagai tujuan berinvestasi (Adipuryanti, 2015).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari

kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Anggraini, 2018). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan dibentuk melalui tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup yang layak (*decent standard of living*) (UNDP, 2017).

Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. IPM dan ketimpangan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Menurut Becker dalam Noto (2016) menyebutkan teori human capital bahwa manusia bukan hanya sebagai sumber daya namun modal (*capital*) yang menghasilkan pengembalian (*return*) dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. IPM ini berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Kajian yang lebih dalam mengenai peran pendidikan formal sebagai salah satu dimensi IPM dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dengan hasil semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja juga akan semakin tinggi. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan.

Teori *human capital* mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia diperoleh dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan negara untuk menyerap teknologi modern sehingga mampu tumbuh dan berkembang dalam mengurangi kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

Indeks Williamson merupakan ukuran ketimpangan pembangunan wilayah yang dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson. Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang dibandingkan adalah tingkat pembangunan antarwilayah, bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Sedangkan pengertian indeks ini adalah bila V_w mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila V_w mendekati 0 berarti sangat merata. Dengan demikian, secara statistik formulasi Indeks Williamson adalah sebagai berikut (Sjafrizal, 2008):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)}}{\bar{y}}, \quad 0 < VW < 1$$

Keterangan:

V_w : Indeks Williamson

f_i : Jumlah penduduk daerah i

n : Jumlah penduduk seluruh daerah

y_i : PDRB perkapita daerah i

\bar{y} : PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah

Pengembangan Hipotesis

H1 : PMDN berpengaruh terhadap IPM

H2 : PMA berpengaruh terhadap IPM

H3 : IPM berpengaruh pada Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

H4 : PMDN berpengaruh pada Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

H5 : PMA berpengaruh pada Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

H6 : PMDN berpengaruh pada Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah melalui IPM

H7 : PMA berpengaruh pada Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah melalui IPM

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh PMA dan PMDN terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah dengan IPM sebagai variabel pemediasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Data yang diteliti meliputi PMA, PMDN, IPM, PDRB perkapita, serta jumlah penduduk. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan antara data cross section yang terdiri dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan time series yang merupakan data tahunan, dimulai pada tahun 2016-2019. Data ketimpangan pembangunan wilayah diperoleh dari perhitungan Indeks Williamson. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Adapun variabel serta definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Variabel dan Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional
Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah	Ketidakterataan distribusi pembangunan ekonomi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Diukur dengan menggunakan Indeks Williamson, perhitungan didasarkan pada PDRB masing-masing daerah dengan rumus berikut (Sjafrizal, 2008): $VW = \frac{\sqrt{\sum_i (v_i - \bar{v})^2 (f_i/n)}}{\bar{v}}, 0 < VW < 1$
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks yang menggambarkan kualitas penduduk atau sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut.
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Penanaman Modal Asing (PMA)	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif. Metode analisis data panel yang digunakan dalam penelitian ini ialah regresi data panel dengan model *Fixed Effect*. Model ekonometrika yang digunakan adalah model analisis jalur (path analysis) dengan pengelolaan data menggunakan Eviews. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2013). Adapun persamaan regresinya sebagai berikut:

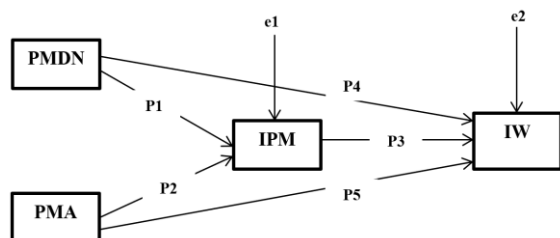
$$IPM = \beta_0 + \beta_1 PMDN + \beta_2 PMA + \varepsilon_1 \dots\dots 1$$

$$IW = \beta_0 + \beta_3 IPM + \beta_4 PMDN + \beta_5 PMA + \varepsilon_2 \dots\dots 2$$

Kemudian persamaan regresi diubah dalam bentuk persamaan semi logaritma dan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$IPM = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPMDN} + \beta_2 \text{LogPMA} + \varepsilon_1$$

$$IW = \beta_0 + \beta_3 \text{IPM} + \beta_4 \text{LogPMDN} + \beta_5 \text{LogPMA} + \varepsilon_2$$



Gambar 1. Model Analisis Jalur (Path Analysis)

Dari gambar 1 analisis jalur dapat digambarkan formulasi struktur yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya dilakukan uji sobel (Sobel Test), perhitungan tersebut berfungsi untuk mengetahui apakah variabel tersebut signifikan atau tidak. Untuk menghitung tingkat signifikansi menggunakan sobel test dengan cara hitung standar error dari koefisien indirect effect (Sab), model persamaan dari sobel test sebagai berikut:

$$Sab = \sqrt{b^2 \cdot sa^2 + a^2 \cdot sb^2 + sa^2 \cdot sb^2}$$

Keterangan:

a : Nilai koefisien dari variabel X ke Y

b : Nilai koefisien dari variabel Y ke Z

sa : Nilai standart error dari variabel X ke Y

sb : Nilai standart error dari variabel Y ke Z

Hasil dan Pembahasan

Analisis Regresi Tahap 1 (Sub Struktur Persamaan 1)

Analisis regresi tahap 1 mengkaji pengaruh PMDN dan PMA terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan persamaan regresinya adalah:

$$IPM = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPMDN} + \beta_2 \text{LogPMA} + \varepsilon_1$$

Hasil penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode pendekatan *Fixed Effect Model* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Tahap 1

Dependent Variable: IPM				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.84531	0.365566	191.0606	0.0000
LOGPMA	0.038018	0.017181	2.212854	0.0291
LOGPMDN	0.120542	0.024719	4.876533	0.0000
R-squared	0.984879			
Adjusted R-squared	0.979594			
S.E. of regression	0.744885			
F-statistic	186.3491			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Analisis Regresi Tahap 2 (Sub Struktur Persamaan 2)

Analisis regresi tahap 2 mengkaji pengaruh IPM, PMDN dan PMA terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah dengan persamaan regresinya adalah:

$$IW = \beta_0 + \beta_3 \text{IPM} + \beta_4 \text{LogPMDN} + \beta_5 \text{LogPMA} + \varepsilon_2$$

Hasil penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode pendekatan *Fixed Effect Model* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Tahap 2

Dependent Variable: IW				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IPM	-0.010185	0.000244	-41.68620	0.0000
LOGPMA	0.000033	0.000106	0.314880	0.7535
LOGPMDN	-0.000115	5.50E-05	-2.093694	0.0388
C	1.369729	0.017105	80.07597	0.0000
R-squared	0.950720			
Adjusted R-squared	0.932844			
S.E. of regression	0.002696			
F-statistic	53.18408			
Prob(F-statistic)	0.000000			

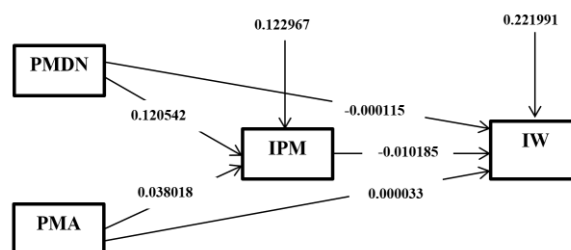
Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan hasil estimasi model pada sub struktur persamaan 1 dan persamaan 2, dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- Variabel PMDN terhadap IPM, memiliki nilai Probabilitas sebesar 0.0000, berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Sehingga H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara PMDN terhadap IPM.
- Variabel PMA terhadap IPM, memiliki nilai Probabilitas sebesar 0.0291, berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Sehingga H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara PMA terhadap IPM.
- Variabel IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah (IW), memiliki nilai Probabilitas 0.0000, berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Sehingga H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh antara IPM pada Ketimpangan Pembangunan (IW).
- Variabel PMDN terhadap Ketimpangan Pembangunan (IW), memiliki nilai Probabilitas 0.0388, berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Sehingga H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara PMDN terhadap Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah (IW).
- Variabel PMA terhadap Ketimpangan Pembangunan (IW), memiliki nilai Probabilitas 0.7535, berarti lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Sehingga H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara

PMA pada Ketimpangan Pembangunan (IW).

Pembentukan Analisis Jalur (Path Analysis)

Dari analisis regresi 1 dan analisis regresi 2 diperoleh analisis jalur sebagai berikut:



Gambar 2. Pembentukan Analisis Jalur

Berdasarkan analisis jalur di atas dapat dilihat bahwa PMDN memiliki pengaruh langsung terhadap ketimpangan pembangunan wilayah dan memiliki pengaruh tidak langsung dari PMDN terhadap ketimpangan pembangunan melalui IPM. Besarnya pengaruh langsung sebesar -0.000115 sedangkan pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengkalikan koefisien PMDN ke IPM dengan IPM ke ketimpangan pembangunan. Selanjutnya untuk mengetahui apakah pengaruh tidak langsung signifikan atau tidak, maka dilakukan uji sobel untuk mengetahui signifikansi nilai koefisien hubungan tersebut. Berikut hasil perhitungan koefisien dan uji sobel (Sobel Test) pengaruh tidak langsung:

Tabel 4

Hasil Analisis Jalur Pengaruh Tidak Langsung I

Indirect Effect	Coefficient	t-Statistic	p-value sobel test
PMDN- IPM- IW	- 0.00122769	- 4.84573992	0.00000126

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengaruh secara tidak langsung memiliki nilai koefisien sebesar -0.00122769, menunjukkan bahwa ketika PMDN meningkat akan menyebabkan IPM meningkat sebesar 1 satuan secara tidak langsung akan memberikan dampak penurunan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah (IW) sebesar -0.00122769. Selanjutnya, nilai p-value sobel test yang didapatkan sebesar 0.00000126 maka nilai p-value sobel test lebih rendah dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, dapat disimpulkan bahwa H6 diterima, sehingga adanya pengaruh mediasi.

Pengaruh langsung dari variabel PMA terhadap ketimpangan pembangunan wilayah sebesar 0.000033, sedangkan pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengkalikan koefisien PMA ke IPM dengan IPM ke ketimpangan pembangunan. Berikut hasil perhitungan koefisien dan uji sobel (Sobel Test) pengaruh tidak langsung:

Tabel 5
Hasil Analisis Jalur Pengaruh Tidak Langsung II

<i>Indirect Effect</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>p-value sobel test</i>
PMA-IPM-IW	-0.000387213	-2.20940512	0.02714648

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengaruh secara tidak langsung memiliki nilai koefisien sebesar -0.000387213, menunjukkan bahwa ketika PMA meningkat akan menyebabkan IPM meningkat sebesar 1 satuan secara tidak langsung akan memberikan dampak penurunan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah (IW) sebesar -0.000387213. Selanjutnya, nilai p-value sobel test yang didapatkan sebesar

0.02714648 maka nilai p-value sobel test lebih rendah dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, dapat disimpulkan bahwa H7 diterima, sehingga adanya pengaruh mediasi.

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2019, penanaman modal dalam negeri menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga hipotesis H1 pada penelitian ini diterima. Apabila realisasi penanaman modal dalam negeri suatu wilayah meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui pencapaian indeks pembangunan manusia wilayah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramatha dan Dwirandra (2018) yang menyatakan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Adanya transfer modal pada suatu wilayah akan memberikan peluang pertumbuhan ekonomi baru di masyarakat. Peluang ekonomi tersebut seperti terciptanya lapangan pekerjaan baru yang akan menyerap tenaga kerja. Sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah dan berdampak pada peningkatan daya beli dan kualitas hidup masyarakat. Serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianti dan Indriyanti (2020) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2019, penanaman modal asing menunjukkan

pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil estimasi penelitian ini sesuai dengan hipotesis H2. Arus masuk penanaman modal asing memiliki dampak positif diantaranya peningkatan produktivitas, transfer teknologi, pengenalan metode dan proses yang terbaru, kecakapan teknik dalam pasar domestik, kemampuan manajerial, pelatihan tenaga kerja, jaringan produksi internasional, dan kemudahan akses ke pasar (Effendi dan Soemantri, 2003).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gokmenoglu, dkk (2018) yang menyatakan penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Serta sejalan dengan penelitian Sharma dan Gani (2007). Kehadiran investor asing akan meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja karena mereka menawarkan upah yang lebih tinggi untuk menarik tenaga kerja yang berkualitas lebih tinggi juga. Sehingga negara akan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan formal atau nonformal.

Semakin banyak penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing maka indeks pembangunan manusia akan semakin baik. Peran pembangunan manusia dalam kegiatan penanaman modal sangat penting. Hal tersebut terlihat pada perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah dan swasta yang mengalokasikan penanaman modal untuk meningkatkan kualitas modal manusia tersebut. Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing bisa disebut sebagai pemicu kesejahteraan manusia dan pembangunan, karena dapat

membawa banyak keuntungan seperti dalam penyerapan tenaga kerja, meningkatkan daya beli, meningkatkan daya saing, dan tetap terhindar dari terjadinya defisit impor. Semua dampak tersebut pada akhirnya akan mengarah pada kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti dalam bidang ekonomi dan infrastruktur (Agusty & Damayanti, 2015)

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga hipotesis H3 pada penelitian ini diterima. Apabila nilai indeks pembangunan manusia suatu wilayah meningkat, maka akan mengakibatkan penurunan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang diukur melalui indeks williamson. Indeks pembangunan manusia yang merupakan indikator pengukuran kualitas sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan teori human capital menurut Becker bahwa manusia yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, akan memiliki pekerjaan dan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan manusia yang memiliki pendidikan rendah. Jika tingkat pendapatan dapat mencerminkan produktivitas, semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, maka semakin tinggi produktivitas dan perekonomian pun akan lebih baik sehingga adanya pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuntari (2016) mengenai disparitas pembangunan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013.

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa variabel penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga hipotesis H4 pada penelitian ini diterima. Apabila realisasi penanaman modal dalam negeri suatu wilayah meningkat, maka akan mengakibatkan penurunan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang diukur melalui indeks williamson. Dalam hal ini penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah karena penanaman modal dalam negeri akan meningkatkan kinerja ekonomi dan akan diikuti oleh penyerapan tenaga kerja, sehingga meningkatkan perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan. Dalam model Harrod-Domar, terdapat dua unsur pokok yang menentukan pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas modal (capital output ratio). Wilayah yang luas dengan sumber daya alam yang melimpah tentunya akan menarik minat investor baik swasta maupun pemerintah untuk menanamkan modalnya di setiap wilayah untuk membangun industri yang sesuai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiton (2019) dimana investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penanaman modal

asing tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2019, sehingga hipotesis H5 pada penelitian ini ditolak. Hal ini terjadi karena sebagian penanaman modal hanya terpusat di beberapa daerah, bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai tingkat penanaman modal asing sangat rendah. Investor hanya menilai daerah-daerah yang mempunyai potensi yang dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi. Investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah setempat, namun investasi yang tidak merata pada setiap daerah menyebabkan kelangkaan modal yang mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan. Selain itu, penanaman modal asing ini tidak banyak menyentuh kelapisan masyarakat artinya investasi yang dilakukan lebih banyak dalam bentuk padat modal yang tidak banyak menggunakan tenaga kerja manusia. Penanaman modal asing di Jawa Tengah hanya terfokus pada beberapa daerah dan belum merata di segala sektor, serta disinyalir kesiapan daerah dalam memanfaatkan investasi masih belum optimal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nurhayani, dkk (2015) dimana PMA tidak ada korelasi yang signifikan terhadap disparitas pembangunan ekonomi. Selain itu, karena adanya kemungkinan penanaman modal pada suatu wilayah membutuhkan jangka waktu. Penanaman modal akan berdampak pada masa yang akan datang atau baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun ke depan. Hal tersebut juga terjadi apabila realisasi investasinya berkelanjutan dan tidak

menutup kemungkinan jika sektor investasi yang berkembang merekrut tenaga kerja dari daerah lain disekitarnya serta memasok bahan baku dari daerah lain sehingga kegiatan ekonomi penanaman modal ini juga berpengaruh pada luar daerah serta pendapatan masyarakat luar daerah (Maskanudin & Wibowo, 2018). Penanaman modal asing yang masuk di setiap wilayah masih rendah dan harus menjadi perhatian pemerintah daerah kedepan, kebijakan dalam mempromosikan daerahnya, baik dalam bentuk kebijakan fiskal maupun belanja infrastruktur serta kemudahan birokrasi dan regulasi, sangat diperlukan untuk menarik minat investasi bagi daerahnya. Investasi masuk yang cukup tinggi akan membantu bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menggunakan variabel intervening atau mediasi yaitu indeks pembangunan manusia yang mengidentifikasi penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah melalui indeks pembangunan manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai p-value Sobel Test sebesar 0.00000126 maka nilai tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, dan memiliki nilai koefisien sebesar -0.00122769. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah melalui indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menggunakan variabel intervening atau mediasi yaitu indeks pembangunan manusia yang mengidentifikasi penanaman modal

asing memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah melalui indeks pembangunan manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai p-value Sobel Test sebesar 0.02714648 maka nilai tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, dan memiliki nilai koefisien sebesar -0.000387213. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah melalui indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh.

Variabel penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah melalui indeks pembangunan manusia. Kemampuan negara dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki tergantung pada sumber daya manusia yang ada seperti kecakapan manajerial dan kapabilitas teknis penduduknya (Todaro & Smith, 2000). Ketimpangan pembangunan akan menurun jika ada pembangunan ekonomi yang salah satunya dengan penanaman modal yang merata. Investor tertarik menanamkan modalnya apabila PDRB per kapita di daerah tersebut tinggi. Hal ini karena daya beli masyarakat akan lebih tinggi sehingga investor mendapatkan profit yang tinggi dan pengembalian modal (return) investasi yang lebih cepat. Daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator dari indeks pembangunan manusia.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila realisasi penanaman modal semakin banyak, maka akan menciptakan kesempatan kerja baru dan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Untuk

menarik investor pemerintah juga akan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan bagi masyarakat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri dan menyebabkan berkurangnya ketimpangan pembangunan pada masyarakat.

Salah satu dimensi indeks pembangunan manusia adalah pendidikan. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi distribusi pendapatan yang pada gilirannya akan mempengaruhi pemerataan pembangunan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka distribusi pendapatan merata, sehingga ketimpangan dapat berkurang. Pendidikan tinggi menghasilkan produktivitas kerja yang lebih baik dan akan memberikan pendapatan yang lebih besar. Susanto dkk. (2018) menjelaskan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam kesejahteraan seseorang dalam berbagai cara. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan penduduk untuk memperoleh dan menggunakan informasi, memperdalam pemahaman ekonomi, memperluas produktivitas, dan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk bertindak sebagai konsumen atau produsen. Selain itu juga berpengaruh terhadap profit daerah bagi investor yang akan semakin besar. Hal inilah yang dapat menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya pada suatu wilayah. Namun, kondisi daerah dengan perbedaan kualitas sumber daya manusia serta penanaman modal yang tidak merata menyebabkan ketimpangan pembangunan yang semakin melebar.

Salah satu contoh realisasi peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan

dalam bentuk mendukung pendidikan masyarakat miskin ke tingkat yang lebih tinggi melalui program Kartu Indonesia Pintar Perguruan Tinggi (KIP-Kuliah). Kemudian aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia juga tercermin dalam kartu pra kerja yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pencari kerja dan kesinambungan pemberian pelayanan kesehatan dengan meningkatkan jumlah bantuan iuran masyarakat. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia sumber daya melalui sektor pendidikan baik formal maupun informal merupakan upaya untuk menarik investor serta pemerataan pendapatan yang nantinya akan berdampak pada pemerataan hasil pembangunan ekonomi daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Penanaman modal dalam negeri dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, namun penanaman modal asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Indeks Pembangunan manusia secara signifikan memediasi pengaruh penanaman modal dalam negeri dan

penanaman modal asing terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Daftar Pustaka

- Adipuryanti, N. P. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Piramida*, 11(1), 20-28. 2015.
- Agusty, Gerry Julian., & Damayanti, Sylviana M. The Effect of Foreign Direct Investment & Official Development Assistance To Human Development Index Of Developing Countries In 2009-2013. *Journal Of Business and Management*, Vol. 4, No. 8: 882-889. 2015.
- Anggraini, Yusniah. *Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia*. Jakarta: Indocamp. 2018.
- Badan Pusat Statistik. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang: Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2020.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2020.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia*. Jakarta: Publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia. 2020.
- Bappeda. *RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023*. Jawa Tengah: Publikasi Bappeda. 2018.
- Dwirandra, Anak Agung Ngurah Bagus. Moderation of Contingency Factors on the Effect of Fiscal Decentralization Inequality between Regencies/City in the Province of Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 16, 137-153. 2021.
- Dwirandra, A.A.N.B., & Pramarta, I Made Aditya. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 22. 3, 2458-2482. 2018.
- Effendi, Nur, & Soemantri, Femmy M, "Foreign Direct Investment and Regional Economic Growth in Indonesia: A Panel Data Study", The 6 TH IRSA INTERNATIONAL CONFERENCE, Regional Development in The Era of Decentralization: Growth, Poverty, and Environment, Bandung. 2003.
- Febrianti, Sukma., & Indriyati Junita. The Effect of Inflation, Poverty, And Investment On Sustainable Development In West Kalimantan Province. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 14, No. 1. 2020.
- Ghozali, Imam. *Analisis Multivariate dan Ekonometrika: Teori Konsep dan Aplikasinya dengan Eviews 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 165. 2003.
- Gokmenoglu, Korhan K., dkk. Impact of Foreign Direct Investment on Human Development Index in Nigeria. *Business and Economics Research Journal*, Vol. 9, No. 1. 2018
- Kiton, Mario Andrias. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Smart*. Volume III No.2. 2019.
- Lesmann, C. Regional Inequality And Decentralization: An Empirical Analysis. *Environment and Planning A: Economy nd Space*, 44(6), 1363-1388. 2012.
- Li, Xiaoying, & Xiaming Liu.. Foreign Direct Investment And Economic Growth: An Increasingly Endogenous Relationship. *World Development* 33 (3): 393-407. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.11.001>. 2005.

- Li, Y., & Wei, Y. H. The spatial-temporal hierarchy of regional inequality of China. *Applied Geography*, 30(3), 303-316. 2010.
- Mankiw, Gregory. *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Maskanudin, Hisyam., & Wibowo, Arif A. Analysis of Inequality of Economic Development in District/Cities Region of Kedu in Central Java Province. *EKO-REGIONAL*, Vol. 13, No. 2, 1-9. 2018.
- Noto, Gantara Hadi. Analisis Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. 2016.
- Nurhayani, N., Hodijah, Siti, & Bhakti, A. Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi dan Hubungannya dengan Investasi di Provinsi Jambi Tahun 2002-2014. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(2). <https://doi.org/10.22437/paradigma.v10i2.3674>. 2015.
- Sharma, Basu., & Ghani Azmat. The Effect of Foreign Direct Investment on Human Development. *Global Economy Journal*, Vol. 4, Issue 2. 2004.
- Sjafrizal. *Ekonomi regional teori dan aplikasi*. Sumatera Barat: Baduouse Media. 2008.
- Soekapdjo, S. Debbie Aryani Tribudhi, Dini Hariyanti, Lucky Nugroho. Factors Affecting Economic Growth in Central Java. *International Journal of Commerce and Finance*, 6(1). 155- 165. 2020.
- Susanto, E., Rochaida, E., & Ulfah, Y. The Effects of Inflation and Education on Unemployment and Poverty. *INOVASI*, 3(1): 19-27. 2018.
- Todaro, M. P.. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga. 2000.
- United Nation Development Programme (UNDP). *Human Development Report*. 2017.
- Wahyuntari, Linda Ika, & Amin Pujiati. Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Anlysis Journal (EDAJ)*. Volume 5, Nomor 3. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 2018.
- Wang, Jian, & Xiao Wang. Benefits Of Foreign Ownership: Evidence From Foreign Direct Investment In China. *Journal of International Economics* 97 (2): 325–38. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2015.07.006> 2015.
- Widarjono, Agus. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.